

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

Dalam *Good Corporate Governance* terdapat *agency theory* yang melatarbelakanginya. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *agency theory* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) dan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga yang profesional (disebut *agents*), yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu prinsip atau peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak minoritas dan juga sebagai alat pemantau kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ada 5 yaitu *Transparancy* (Keterbukaan) yakni, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, *Accountability* (Akuntabilitas) merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, *Responsibility* (Pertanggungjawaban) merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, *Independency* (Kemandirian) yakni suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, *Fairness* (Kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Komite Audit

Komite audit dapat diartikan sebagai komite yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan demi terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance*. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.

Keberadaan komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal ini karena berhubungan dengan fungsi komite audit untuk pengawasan integritas laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan prinsip – prinsip GCG yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM – LK No: Kep – 643/BL/2012

komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam Effendi (2016:59-60) Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan rapat internal secara rutin dengan dewan komisaris dan manajemen.

Rapat rutin dengan dewan komisaris untuk melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala, sedangkan rapat rutin dengan manajemen untuk membicarakan semua pokok-pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non finansial organisasi secara “terbuka” sehubungan dengan perannya untuk mengawasi *Corporate Governance*.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif (Debby et al., 2012). Dengan demikian, semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Selain itu, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sehingga

dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Perdana dan Raharja (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen monitoring ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka dapat menimbulkan dugaan bahwa

manajemen laba dapat meningkat jika kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menciptakan manajemen laba yang tinggi.

Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (Frysa Praditha Purwaningtyas, 2019). Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer.

Dalam Siallagan dan Machfoedz, (2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajemen tidak hanya terhadap manajemen laba, tetapi juga berhubungan dengan saham. Maka dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat dipandang baik dalam menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga permasalahan yang timbul antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seseorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Widjaja (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut: “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut: “Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006) komisaris independen sebagai berikut: “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau \hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Dewan komisaris independen antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Raden et al., n.d.).

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Keberadaan komisaris independen sendiri diatur dalam ketentuan perturan pencatatan efek Bursa Efek Indonesia FCGI (2002). Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2.1.6 Manajemen Laba

Laba yang dilaporkan berpengaruh kuat terhadap kegiatan perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh manajemennya. Keasikan perusahaan memenuhi harapan pasar modal mencerminkan bahwa manajemen sangat peduli terhadap risiko nilai saham perusahaan bila gagal. Menanggapi risiko tersebut, manajemen mungkin berpandangan bahwa tanggung jawabnya adalah melakukan apa saja yang memungkinkan dalam batasan tertentu agar ramalan pasar modal oleh para analis dapat dipenuhi atau dilebihi, atau melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dipandang sebagai suatu konsep lintas periode, dimana laba digeser dari satu periode ke periode lainnya. Sampai saat ini manajemen laba belum didefinisikan secara akurat dan berlaku secara umum. Walaupun demikian beberapa definisi sudah dapat diterima secara luas.

Pengertian *earnings management* menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:210) adalah sebagai berikut: “Pengelolaan laba (*earnings management activities*) adalah bagian-bagian dari rekayasa keuangan yang lazim di pasar modal. Magrath dan Weld membedakan kegiatan pengelolaan laba yang merupakan praktik bisnis yang sehat (*good business practices*) dan pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan (*abusive earnings management*). Pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan (selanjutnya diistilahkan sebagai “pengelolaan laba abusif”) bertujuan menipu masyarakat penanam modal”.

Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey (2010:81) *earnings management* adalah : “Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya”. Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari sekumpulan aturan (misal, GAAP), wajar jika mengharapakan bahwa manajer akan memilih kebijakan yang dapat 15 memaksimalkan kepentingan mereka dan nilai pasar sahamnya. Ini disebut manajemen laba.

Menurut Moeljadi (2006:26) *earnings management* adalah : “*Earnings management* dapat dilakukan dengan cara maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba merupakan maksimalisasi penghasilan perusahaan setelah pajak. Maksimalisasi laba sering dianggap sebagai tujuan perusahaan”.

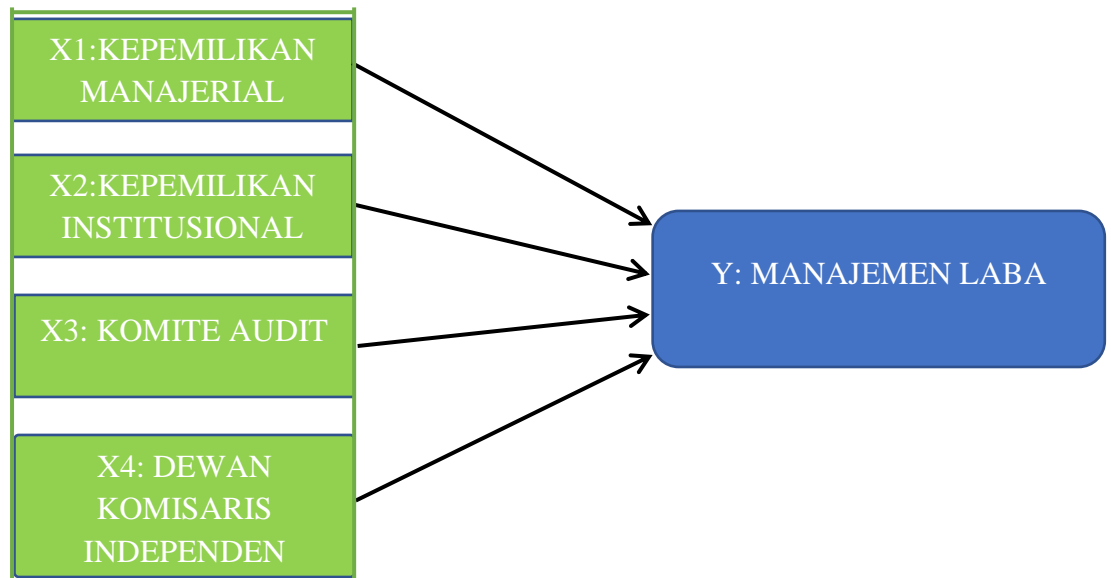
Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Astika Sari (2014)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2	Nanik Surhayati (2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

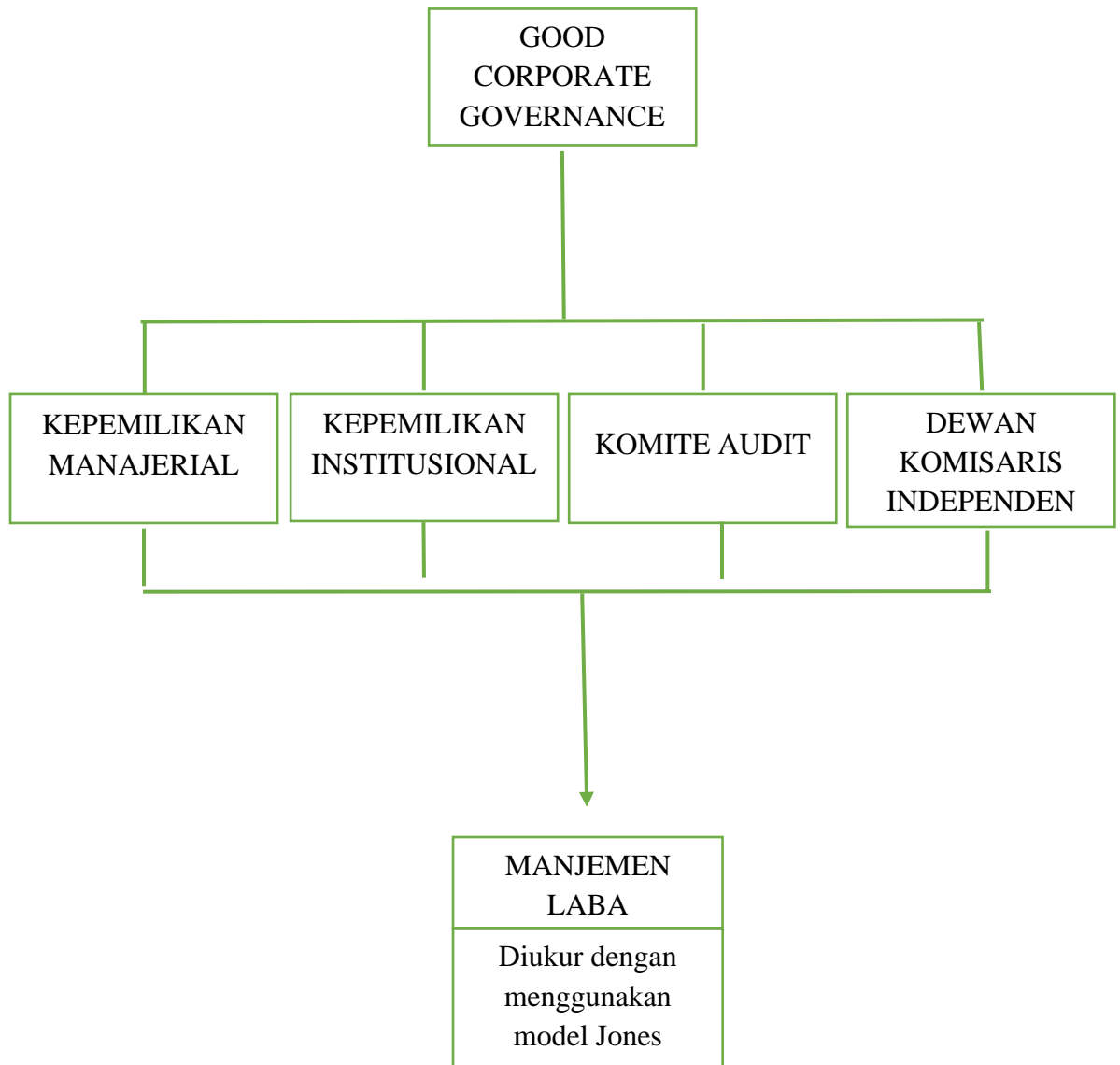
3	Dian Agustia (2013)	Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
4	Fioren Asitalia Ita Trisnawati (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5	Yusuf Mangkusuryo, A. Waluyo Jati (2017)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3 Model Teori



2.4 Model Teori

Berdasarkan uraian teori dapat ditetapkan model teorinya sebagai berikut:



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. (Rahmawati, 2012). kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti apabila kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan tersebut rendah dan sebaliknya (Anggana & Prastiwi, 2013).

Lain halnya dengan Sari *et al.* (2014) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun tidak signifikan, serupa dengan Sari *et al.* (2014) menurut Aygun *et al.* (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang berarti apabila kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut juga tinggi dan sebaliknya.

Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial karena dengan kepemilikan manajerial yang semakin meningkat maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, investment banking, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut. Chew dan Gillan (2009:176) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis investor institusional, yaitu investor institusional sebagai *transient investors* (pemilik sementara perusahaan) dan investor institusional sebagai *sophisticated investors*. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap praktik manajemen laba, semakin kecil persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk memanipulasi pelaporan laba (Widyastuti, n.d.).

Bertolak belakang dengan hasil penelitian Sari *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba tetapi tidak signifikan yang berarti apabila kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktik manajemen laba yang terjadi di dalam perusahaan juga tinggi dan sebaliknya.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional diukur dari presentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin

dilakukan sehingga dapat tercipta manajemen laba yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris melalui surat keputusan (SK) dewan komisaris, keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan disebabkan bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Effendi 2016).

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto, 2008:156). Hasil penelitian oleh Alves (2011) juga mengungkapkan kesimpulan yang sama, yaitu keberadaan komite audit di perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Namun hasil penelitian itu berbeda dengan Alkdaei dan Hanefah (2012) yaitu bahwa besar kecilnya ukuran komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena tujuan perusahaan membentuk komite audit hanya sekedar untuk memenuhi peraturan Bapepam yang bersifat *mandatory*. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.5.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Sulistyanto, 2008:144).

Hasil penelitian (Murhadi, 2009) Sri, Oktovianti dan Agustia (2012). yang menunjukkan bahwa proporsi atau ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan Sari *et al.* (2014) penelitiannya menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang berarti apabila proporsi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut tinggi dan sebaliknya. Kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak efektif. Besarnya proporsi dewan komisaris independen juga dapat menyebabkan terjadinya koordinasi yang tidak efektif di antara dewan komisaris independen sehingga kinerja dewan komisaris independen menjadi menurun. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Proporsi Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.